

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pengaturan pengembangan kompetensi PNS telah di atur dalam Pasal 70 UU ASN yang mengatur tentang hak dan kesempatan bagi PNS dalam pengembangan kompetensi dan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS telah diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 217 PP No. 17 Tahun 2020, dalam Pasal 210 Ayat (2) dan Pasal 213 sampai Pasal 216 PP No. 11 Tahun 2017, serta dalam Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018 yang mana aturan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan dan kewenangan pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS di tingkat instansi dan nasional yang penyelenggaraannya merupakan kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, instansi teknis, dan instansi pembina jabatan fungsional. Pemerintah telah mengatur tentang legalitas pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai PNS, namun pengaturan tersebut belum didukung secara menyeluruh dalam pengaturan yang ada di tingkat daerah, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS di tingkat daerah belum optimal, oleh karena itu perlunya regulasi dan penataan yang terencana dan berkesinambungan terhadap pengembangan kompetensi bagi PNS pada instansi atau pemerintah daerah dengan dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS yang dilakukan pada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dari data yang di dapatkan hanya 30 orang dari 66 orang PNS di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti pengembangan kompetensi PNS dan juga tidak disusunnya rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan, hal ini menunjukkan masih belum optimalnya dan belum sesuaiya pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam Pasal 70 UU ASN dan dalam Pasal 203 PP No. 17 Tahun 2020, serta dalam pelaksanaan manajemen PNS selama ini belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki PNS, sehingga mempengaruhi produktivitas kerja pegawai. Hal ini berdampak pada kompetensi pegawai yang kurang efektif, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya seringkali tidak berjalan optimal dan mempengaruhi mutu pelayanan publik. Belum optimalnya pengembangan kompetensi PNS di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat di sebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan ketersediaan anggaran, rendahnya upaya mandiri Pegawai dalam pengembangan kompetensi diri, terbatasnya jumlah PNS yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi untuk mengisi beberapa jabatan yang ada, adanya perbedaan pemahaman dan kemampuan dalam merancang perencanaan pengembangan kompetensi, adanya benturan antara ketentuan peraturan dengan kebijakan pengambil keputusan, Adanya Covid-19 berdampak pada pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai. Dengan adanya berbagai faktor

penghambat tersebut maka sulit untuk melakukan pengembangan kompetensi PNS pada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin mencoba memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Diharapkan kedepannya Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat untuk lebih memberikan perhatian kepada para aparaturnya, dengan cara pemenuhan hak aparatur dalam pengembangan kompetensi sumber daya yang dimiliki oleh para aparaturnya agar mampu bersaing dan tidak ketinggalan oleh kemajuan zaman. Serta untuk melaksanakan pengembangan kompetensi PNS, Dinas ESDM harus melakukan penataan kembali sumber daya manusia aparatur dan tatalaksana pemerintahan dengan memperhatikan kesesuaian dengan tujuan, urgensi, visi, dan misi yang dimiliki oleh instansinya. Serta melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap pegawai sehingga bisa mengetahui PNS yang telah memenuhi kompetensi, dan yang belum memenuhi kompetensi agar nantinya bisa dilakukan pengembangan kompetensi terhadap PNS yang bersangkutan.
2. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat diharapkan meningkatkan alokasi anggaran yang lebih besar dan memadai untuk keperluan pengembangan kompetensi PNS, serta perlu menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan pada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.